

Pengaruh SiLPA dan Dana Transfer Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening: Studi Kabupaten Kutai Timur

Meiki Permana^{1*}, Syamsul Arif², Titin Ruliana³

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

meiki.permana@untag-smd.ac.id

ABSTRACT.

This study comprehensively analyzes the determinants of regional financial independence in East Kutai Regency, a resource-rich region that paradoxically exhibits an extreme level of fiscal dependence on the central government, accompanied by a massive accumulation of the Remaining Budget Financing (SiLPA). Utilizing secondary time-series data spanning 2005-2025 extracted from Budget Realization Reports, this quantitative research implements a Variance-Based Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach using the Stable3 and Warp3 algorithms via WarpPLS 8.0 software. The analysis proves that SiLPA has a positive and significant effect on Capital Expenditure, indicating that the previous year's budget surplus serves as the primary backbone for physical investment financing. Transfer Funds are also statistically proven to positively affect Capital Expenditure, directly confirming the existence of the Flypaper Effect phenomenon within the fiscal anatomy of mining regions. Conversely, SiLPA exerts a highly significant negative effect on Regional Financial Independence, an anomaly diagnosing the occurrence of Fiscal Laziness, where massive idle cash reserves reduce the region's incentive to optimize locally-generated revenue (PAD). Furthermore, Capital Expenditure fails to affect or mediate Financial Independence due to the consumptive and suboptimal quality of spending allocations. The managerial implications demand a total overhaul of the budget planning architecture through early procurement to eliminate artificial SiLPA inefficiencies, alongside a philosophical transformation of capital allocations towards productive sectors capable of sustainably stimulating local economic circulation.

Keywords: Transfer Funds; Capital Expenditure; Regional Financial Independence; Fiscal Laziness; Flypaper Effect

ABSTRAK.

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif determinan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kutai Timur, sebuah daerah kaya sumber daya yang secara paradoks menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal ekstrem pada pusat, diiringi akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang masif. Memanfaatkan data sekunder runtun waktu 2005-2025 dari Laporan Realisasi Anggaran, penelitian kuantitatif ini mengimplementasikan pendekatan *Variance-Based Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan algoritma Stable3 dan Warp3 via perangkat lunak WarpPLS 8.0. Analisis membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, mengindikasikan surplus tahun sebelumnya menjadi tulang punggung pembiayaan investasi fisik. Dana Transfer juga terbukti memengaruhi Belanja Modal, yang secara langsung mengonfirmasi eksistensi fenomena *Flypaper Effect* pada anatomi fiskal daerah tambang. Sebaliknya, SiLPA memancarkan pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sebuah anomali yang mendiagnosis terjadinya *Fiscal Laziness* (kemalasan fiskal), di mana besarnya

cadangan kas mengganggu menurunkan insentif daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut, Belanja Modal terbukti gagal memengaruhi maupun memediasi Kemandirian Keuangan akibat kualitas alokasi belanja yang bersifat konsumtif. Implikasi manajerial menuntut perombakan arsitektur perencanaan anggaran melalui percepatan lelang dini guna mengeliminasi inefisiensi SiLPA artifisial, serta transformasi filosofis alokasi modal menuju sektor-sektor produktif yang mampu menstimulasi perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Transfer; Belanja Modal; Kemandirian Keuangan Daerah; *Fiscal Laziness*; *Flypaper Effect*

PENDAHULUAN

Paradigma desentralisasi fiskal yang secara fundamental diadopsi oleh Indonesia pada era pasca-reformasi menuntut adanya transformasi radikal dalam pola hubungan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagaimana yang diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dipertegas dan direstrukturisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tujuan hakiki dari pemberian otonomi adalah untuk memandirikan daerah. Kemandirian ini seyogianya tidak boleh hanya dimaknai sebagai sekadar pelimpahan kewenangan administratif dan desentralisasi birokratis semata, melainkan harus diterjemahkan secara nyata sebagai kemampuan substantif daerah untuk menggali kapasitas fiskalnya sendiri guna membiayai belanja publik secara berkelanjutan, tanpa harus terperangkap dalam ketergantungan yang kronis pada injeksi dana transfer dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, realitas empiris di lapangan selama lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi sering kali menunjukkan pola *asymmetric decentralization* (desentralisasi asimetris), di mana pelimpahan kewenangan di sektor belanja (*expenditure assignment*) berjalan jauh lebih masif dan cepat dibandingkan dengan perbaikan kapasitas kelembagaan daerah untuk mengelola dan menggali penerimaannya sendiri (*revenue assignment*). Ketimpangan struktural ini menciptakan celah fiskal (*fiscal gap*) yang sangat lebar, yang pada akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk terus bergantung pada Dana Transfer. Injeksi finansial dari pusat ini hadir baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan untuk pemerataan *fiscal drag*, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersifat *earmarked* (memiliki peruntukan spesifik), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang berbasis pada porsi sumbangsih wilayah (*origin-based*). Ketergantungan absolut ini kemudian melahirkan kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*), di mana stabilitas dan kontinuitas pelayanan publik di tingkat daerah menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap gejolak makroekonomi nasional maupun fluktuasi harga komoditas di pasar global yang secara langsung memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam konstelasi desentralisasi di Indonesia, Kabupaten Kutai Timur merepresentasikan sebuah anomali yang sangat menarik, kompleks, sekaligus problematik dalam diskursus tata kelola keuangan daerah. Sebagai sebuah kawasan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah, khususnya dari sektor pertambangan ekstraktif batubara dan perkebunan monokultur kelapa sawit Kutai Timur secara statistik makro di atas kertas memiliki kapasitas fiskal yang sangat raksasa. Berdasarkan data agregat runtun waktu dari Badan Pusat Statistik serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tercatat mengalami lonjakan eksponensial yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan, APBD kabupaten ini diproyeksikan dan tercatat mampu menembus angka realisasi yang sangat masif, yakni sebesar Rp 0,44 triliun pada tahun anggaran 2024 dari target awal yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,07 triliun.

Namun, kemegahan volume APBD triliunan rupiah ini justru menyembunyikan sebuah paradoks struktural; besarnya angka tersebut tidak serta merta mencerminkan fondasi kemandirian keuangan daerah yang kokoh. Data historis menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berfluktuasi pada level yang sangat memprihatinkan, yakni hanya selalu stagnan berada pada kisaran 3% hingga 5% per tahunnya, sementara dominasi postur Dana Transfer dari pusat mencapai proporsi lebih dari 90%. Kondisi ketimpangan persentase yang sangat timpang ini mengindikasikan secara kuat terjadinya gejala ilusi fiskal (*fiscal illusion*), sebuah fenomena psikologis-ekonomi di tataran birokrasi di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya merasa "sangat kaya" karena besarnya aliran arus kas yang masuk ke kas daerah, padahal fundamental ekonomi riil daerah tersebut sesungguhnya sangat rapuh. Kekayaan finansial tersebut semata-mata bersumber dari variabel eksternal, yaitu transfer pusat yang didorong oleh *commodity boom* global, yang berada sepenuhnya di luar kendali dan otoritas pemerintah daerah. Guncangan akibat ketergantungan kronis ini terbukti secara fatal ketika terjadi sedikit saja keterlambatan transfer dana bagi hasil dari pusat, seperti insiden yang tercatat pada tahun 2024 yang memicu defisit arus kas mendadak hingga mencapai Rp ,62 triliun. Defisit artifisial ini secara berantai menyebabkan seluruh sistem likuiditas keuangan daerah mengalami turbulensi hebat yang menghambat eksekusi belanja publik, menghentikan pembangunan infrastruktur strategis, dan memukul mundur kepercayaan kontraktor lokal.

Salah satu indikator patologis dari kesehatan pengelolaan keuangan daerah yang paling krusial untuk dibedah lebih dalam adalah fenomena pembengkakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Secara normatif dan teoretis menurut standar akuntansi pemerintahan, SiLPA dapat tercipta karena dua kondisi ideal yang merepresentasikan prestasi manajerial: adanya efisiensi belanja (penghematan anggaran berbasis nilai uang/*value for money*) atau adanya pelampauan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan. Namun, dalam konteks realitas operasional pemerintah daerah di Indonesia, dan secara sangat spesifik teramati di Kabupaten Kutai Timur, akumulasi SiLPA yang bernilai triliunan rupiah cenderung lebih

diasosiasikan dengan inefisiensi birokrasi, kelambanan daya serap anggaran, serta kegagalan sistemik dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan (*budget execution failure*).

Data runtun waktu APBD Kabupaten Kutai Timur memperlihatkan tren eskalasi SiLPA yang sangat mengkhawatirkan dan tidak lazim. Pada akhir tahun anggaran 2022, SiLPA tercatat berada pada angka Rp ,5 triliun. Alih-alih menurun melalui akselerasi perbaikan, angka ini justru membengkak menjadi Rp ,7 triliun pada akhir tahun 2023, dan diestimasikan memiliki potensi untuk menyentuh kisaran angka Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun pada tahun pelaporan 2024 jika langkah-langkah darurat untuk akselerasi penyerapan tidak diimplementasikan secara drastis oleh otoritas daerah. Besaran SiLPA ini sama sekali bukan sekadar residu entri akuntansi; ia secara nyata merepresentasikan *opportunity cost* (biaya peluang ekonomi) yang luar biasa besar bagi masyarakat. Dana triliunan rupiah yang hakikatnya seharusnya berputar di urat nadi perekonomian masyarakat lokal dalam bentuk stimulus pembangunan jalan poros desa, jembatan antar-kecamatan, fasilitas kesehatan primer, maupun infrastruktur fisik pendidikan yang inklusif, justru berakhir mengendap secara pasif di dalam brankas kas daerah sebagai dana tak terpakai (*idle cash*) yang perlahan tergerus oleh laju inflasi.

Selain permasalahan patologis pada SiLPA, diskursus tata kelola keuangan daerah juga kerap kali diwarnai oleh pembuktian sebuah fenomena teoretis ekonomi publik yang dikenal sebagai *Flypaper Effect*. Postulat ini, yang pertama kali diperkenalkan untuk menganalisis perilaku belanja lokal di negara-negara federal, menyatakan bahwa dana segar yang berasal dari transfer pemerintah pusat (*unconditional grants*) secara konsisten cenderung memberikan stimulasi yang jauh lebih besar terhadap kebiasaan ekspansi belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan stimulasi yang dihasilkan dari peningkatan kapasitas pendapatan daerah itu sendiri (PAD). Uang transfer dari pusat dianalogikan bagaikan lalat yang menempel di kertas perangkap, "menempel di mana ia jatuh" (*money sticks where it hits*) dalam sistem birokrasi, alih-alih dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pengurangan beban pungutan retribusi dan relaksasi pajak daerah.

Indikasi eksistensi *Flypaper Effect* di Kabupaten Kutai Timur sangatlah nyata dan dapat diamati dari postur agregat. Peningkatan tren transfer DBH dari pusat selalu diiringi oleh peningkatan yang sangat agresif pada sisi alokasi belanja daerah secara keseluruhan. Namun yang menjadi kejanggalan anomali adalah, peningkatan volume transfer ini tidak selalu terdistribusi secara proporsional dan rasional ke dalam porsi Belanja Modal yang berorientasi pada investasi produktif publik. Terdapat indikasi statistik yang kuat bahwa lonjakan kucuran transfer tersebut lebih banyak yang terserap habis menjadi belanja operasional birokrasi (belanja pegawai, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa yang bersifat konsumtif habis pakai) atau justru pada akhirnya bermuara menjadi timbunan SiLPA tambahan di penghujung tahun akibat kegagalan eksekusi proyek.

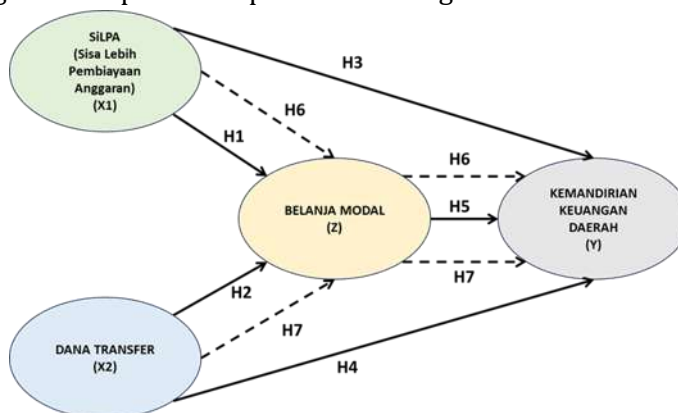
Urgensi untuk meneliti interaksi kompleks dan mengurai benang kusut antara faktor-faktor ini menjadi sangat kritis demi perbaikan arsitektur kebijakan

fiskal regional. Belanja Modal, secara konseptual dalam ekonomi pembangunan, selalu diidealkan sebagai variabel perantara (*intervening variable*) yang paling strategis. Logika transmisi ekonominya adalah: ruang fiskal kelonggaran (*fiscal space*) yang tercipta dari injeksi Dana Transfer dan ketersediaan saldo SiLPA tahun lalu seharusnya dapat dialokasikan secara tajam ke dalam instrumen Belanja Modal untuk membangun dan merevitalisasi infrastruktur dasar dan ekonomi. Infrastruktur publik yang andal dan berkualitas akan serta merta mereduksi biaya logistik barang dan jasa, memantik gairah arus investasi swasta ke sektor non-ekstraktif, dan menggerakkan roda perputaran perekonomian masyarakat lokal di tingkat akar rumput. Ekspansi dan agregasi aktivitas ekonomi masyarakat inilah yang pada gilirannya akan memperluas basis perpajakan (*tax base*) dan retribusi daerah, sehingga berujung pada peningkatan kurva PAD dan tercapainya sebuah rasio kemandirian keuangan yang otonom secara *de facto*.

Namun, rantai transmisi logis ini tampaknya mengalami distorsi mekanistik dan penyumbatan alokasi (*bottleneck*) yang teramat parah di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan latar belakang empiris dan *gap* konseptual (kesenjangan riset) tersebut, penelitian ini disusun secara komprehensif untuk membedah "kotak hitam" tata kelola mekanisme keuangan daerah di wilayah yang dikategorikan kaya sumber daya, dengan merumuskan beberapa tujuan utama penelitian: () Menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal, (2) Menganalisis pengaruh Dana Transfer terhadap Belanja Modal untuk menguji eksistensi *Flypaper Effect*, (3) Menganalisis pengaruh SiLPA terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Menganalisis pengaruh Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta (5) Mengevaluasi secara kritis sejauh mana peran Belanja Modal mampu berfungsi sebagai variabel *intervening* yang memediasi hubungan antara kekuatan fiskal eksternal/saldo masa lalu dengan penciptaan kemandirian keuangan daerah. tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual dari penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah, 2026

Rancangan arsitektur penelitian dalam naskah ini bertumpu secara esensial pada paradigma pendekatan kuantitatif berjenis eksplanatif (*explanatory research*). Metode eksplanatif diterapkan karena esensi objektif dari riset ini tidak sebatas pada penjabaran deskriptif, melainkan bermaksud untuk menguji probabilitas saintifik, memvalidasi postulat teoritis, serta mengurai rumitnya jaring-jaring kausalitas (*cause-and-effect relationship*) antar-variabel secara simultan dalam konstelasi manajemen makroekonomi daerah.

Subjek populasi dan wilayah unit analisis spasial dalam riset ini difokuskan secara tunggal pada kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan lokus ini berbasis *purposive* dengan mempertimbangkan keberadaan Kutai Timur sebagai lumbung komoditas ekstraktif batubara yang menampilkan fenomena anomali *Natural Resource Curse*, dimana PDRB fantastis berbenturan dengan dominasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang fluktuatif serta pembengkakan sisa likuiditas anggaran (SiLPA) tahunan yang parah. Kerangka waktu observasi (*time horizon*) difiksasi pada data runtun waktu (*time-series*) yang membentang selama 11 (sebelas) tahun fiskal berturut-turut, dihitung sejak tahun anggaran 2015 hingga proyeksi penutupan tahun anggaran 2025.¹ Penetapan *baseline* tahun 2015 dipertimbangkan sebagai titik kematangan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual (sebagaimana mandat PP 71/2010) yang secara dramatis merevolusi akurasi pengakuan aset belanja modal, sekaligus menandai era berlakunya diskresi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 secara mandiri oleh daerah yang diharapkan mendongkrak kemandirian.

Basis materi data empiris yang digunakan sepenuhnya bertumpu pada sekumpulan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi (*open source*). Dokumentasi primer (*raw data*) diekstraksi secara sistematis dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan dan tahunan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Timur, yang telah melalui audit rigid (*due diligence*) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan opini paripurna Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta direkonsiliasi silang dengan portal publikasi elektronik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

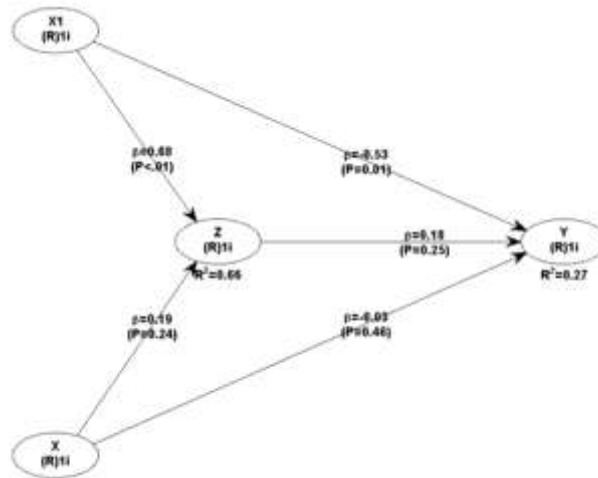
Definisi operasional serta konstruksi pengukuran matematis untuk setiap elemen variabel ditetapkan secara ketat: Variabel endogen utama, yakni Kemandirian Keuangan Daerah (Y), dirumuskan menggunakan persamaan rasio perbandingan di mana persentase agregat Pendapatan Asli Daerah (PAD) riil dibagi terhadap total penerimaan Dana Transfer. Variabel eksogen pertama, yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA (X1), dikuantifikasi berdasarkan logaritma natural (Ln) dari nilai absolut nominal sisa selisih penerimaan dan pengeluaran tunai di penghujung periode kas tahunan. Transformasi logaritma natural ini merupakan justifikasi statistik wajib untuk menormalisasi kurva distribusi dan meredam ekstremitas varians data yang berada pada rentang orde triliunan rupiah. Variabel eksogen kedua, Dana Transfer (X2), dioperasionalisasikan melalui agregasi logaritma natural dari

seluruh arus kas perimbangan (mencakup akumulasi DAU, transfer DAK spesifik, dan porsi DBH). Terakhir, variabel yang diposisikan sebagai jembatan perantara atau mediasi, yaitu Belanja Modal (Z), dikalkulasikan sebagai persentase dari rasio realisasi kumulatif pengeluaran pembentukan modal/aset fisik dibagi terhadap agregat total realisasi seluruh nomenklatur belanja daerah di tahun yang bersangkutan.

Terkait dengan limitasi ekonometrika di mana konstelasi data hanya memuat deret waktu tunggal dengan total unit observasi yang berukuran sangat mikro ($N = 11$), pengujian hipotesis dan estimasi parameter tidak dimungkinkan untuk dieksekusi menggunakan regresi OLS tradisional maupun *Covariance-Based SEM* (CB-SEM) tanpa melanggar secara fatal kaidah kecukupan derajat kebebasan (*degrees of freedom*). Sebagai justifikasi pemecahan komputasi yang *robust*, penelitian ini mengaplikasikan metodologi pemodelan *Variance-Based Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan wahana perangkat lunak spesialis WarpPLS versi 8.0.

Untuk memanipulasi keterbatasan *sample size* yang kritis tersebut, riset ini mengimplementasikan inovasi algoritma *resampling* mutakhir dari Kock (2018), yang dinamakan *Stable3*, yang dikonfigurasi pada rentang eksekusi 100 *resamples* iteratif. Algoritma *Stable3* terbukti secara eksperimental via simulasi Monte Carlo mampu memproduksi estimasi *p-value* dan *standard error* yang sangat stabil tanpa memicu inflasi nilai-t, sehingga akurasi keputusan pada sampel kecil dapat sejajar dengan sampel makro. Lebih jauh lagi, topologi analisis jalur batin (*inner model*) disetel menggunakan protokol algoritma *Warp3 Basic*, yang secara khusus didesain untuk mendeteksi secara intelijen, menangkap jejak, dan memodelkan dinamika sebaran data non-linear serta membedah kurva relasi asimetris (bengkokan berbentuk 'U' maupun kurva eksponensial) yang lazim tersembunyi di dalam struktur data makro-keuangan perbendaharaan daerah. Evaluasi model dibagi menjadi dua sekuens analitis, yaitu validasi instrumen proksi melalui evaluasi model luar (*outer measurement model*) disusun dengan verifikasi hipotesis pada model struktural dalam (*inner structural model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Hasil analisis

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 2. Dinamika Makro-Fiskal APBD Kabupaten Kutai Timur (2015-2025)

Tahun Anggaran	Realisasi SiLPA (Rp)	Penerimaan Dana Transfer (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)
2015	429.852.118.169	2.418.510.634.515	1.400.114.626.067
2016	17.464.253.862	2.221.155.168.077	1.125.351.194.633
2017	16.944.834.473	1.535.326.847.118	606.770.977.994
2018	31.095.984.484	2.300.810.160.981	843.100.468.536
2019	23.705.548.089	2.742.054.133.360	1.064.610.093.262
2020	164.230.318.401	2.718.721.168.547	846.728.032.422
2021	271.834.893.005	2.156.900.953.175	706.899.903.373
2022	539.665.228.850	3.966.815.708.205	1.005.918.036.438
2023	1.579.066.464.941	6.343.351.523.069	3.286.244.178.685
2024	1.772.332.505.394	8.704.865.971.794	5.090.814.816.170
2025	113.997.418.271	6.251.299.660.814	1.332.742.128.941

Menilik anatomi fluktuasi pada Tabel 2, variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merefleksikan tren kenaikan eksponensial yang patologis pasca-pandemi COVID-19.¹ Nilai likuiditas sisa kas terendah terekam pada kurun waktu deflatoar 2016-2017 (berada pada level belasan miliar rupiah) yang secara absolut berkorelasi dengan periode anjloknya siklus harga komoditas batubara di pasar internasional yang menyebabkan kontraksi transfer DBH dan menipisnya bantalan sisa anggaran.¹ Sebaliknya, fenomena disfungsi yang mengerikan tercipta ketika indeks SiLPA melesat secara vertikal menembus ambang batas psikologis Rp1,7 triliun pada tahun 2023 dan estimasi 2024, didorong oleh perputaran *commodity boom*.

Meluapnya tabungan ini merepresentasikan sebuah bentuk kegagalan mesin birokrasi daerah yang akut. Uang tunai yang semestinya berfungsi sebagai pelumas penggerak sirkulasi ekonomi, berubah wujud menjadi genangan kas tak bertuan akibat serangkaian kegagalan sistemik. Hambatan tersebut berakar pada disrupsi server Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan mandeknya pencairan termin, hingga penumpukan penjadwalan penyaluran Dana Bagi Hasil oleh Kemenkeu yang baru diluncurkan pada Triwulan IV, yang secara teknis tidak menyisakan ruang waktu yang realistis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan tender pekerjaan konstruksi.

Searah dan setarikan napas dengan kurva SiLPA, variabel Dana Transfer mempertontonkan laju ekspansi pertumbuhan yang masif, meroket menembus Rp8,7 triliun di tahun 2024, yang mengokohkan pilar *Natural Resource Dependency*. Di sektor pengeluaran, pergerakan persentase alokasi Belanja Modal mereplikasi pola kurva "U-Shape". Komposisi proporsi belanja fisik sempat tergerus parah ke titik nadir pada rentang waktu 2017-2022 akibat kanibalisasi dari pos belanja pegawai dan pengadaan barang habis pakai operasional perkantoran.¹ Namun secara mengejutkan, persentase ini ditarik naik secara drastis hingga meroket ke persentase fantastis sebesar 42% dari total APBD pada periode krusial menjelang siklus pemilu 2023-2024. Lonjakan ini dideteksi tidak murni dari rasionalitas perencanaan jangka panjang, melainkan didorong oleh injeksi darurat pencairan SiLPA tahun-tahun sebelumnya untuk membiayai pengerjaan mega-proyek fisik dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (*Multi-Years Contract*).

Di tengah badai likuiditas triliunan rupiah yang masuk, profil parameter Kemandirian Keuangan Daerah justru melukiskan sebuah anomali paradoks yang teramat suram. Selama sedekade penuh, performa rasio kemandirian (PAD) konsisten terpuruk dan terjebak pada angka *single-digit*, berkisar rata-rata di bawah level 10%. Fenomena degradasi rasio kemandirian yang terjadi bersamaan di saat dana kucuran transfer dan SiLPA sedang memuncak (2023-2024: kemandirian anjlok ke 5-7%) merupakan bukti kuantitatif awal yang sangat terang benderang dari terjangkitnya birokrasi lokal oleh virus patologi *Fiscal Laziness* (kemalasan untuk berpikir inovatif.)

Validasi Kualitas Pengukuran (*Outer Model*) dan Fit Struktural (*Inner Model*) Sebelum melakukan interpretasi pada pembuktian silang antar-hipotesis, sebuah tinjauan metodologis (*due diligence*) terhadap integritas *outer model* mutlak dipaparkan. Parameter komputasional WarpPLS 8.0 mendeklarasikan bahwa pengujian Validitas Konvergen dipenuhi secara nir-cacat. Koefisien *Loading Factor* (pembobotan faktor) untuk keseluruhan indikator pembentuk variabel laten (SiLPA, Dana Transfer, Belanja Modal, Kemandirian) membukukan skala sempurna sebesar 1.000. Kondisi kesempurnaan ini terjustifikasi secara matematis mengingat arsitektur konstruksi data dalam pemodelan keuangan agregat ini merepresentasikan pendekatan *single-item formative indicator*. Seluruh bobot *loading* diiringi oleh parameter T-Ratio sebesar 7.527 yang jauh melampaui level

ambang batas signifikansi dua-sisi ($p\text{-value} < 0.001$), memvalidasi presisi pengukuran tanpa bias varians.

Verifikasi Validitas Diskriminan, yang ditujukan untuk memastikan sterilisasi bahwa tidak ada satu variabel pun yang saling tumpang-tindih merepresentasikan fenomena yang sama, dijawab melalui metodologi kaidah Fornell-Larcker. Angka akar kuadrat dari ekstraksi varians rata-rata ($\sqrt{\text{AVE}}$) dari setiap dimensi laten terhitung di angka mutlak 1.000, yang posisinya selalu jauh lebih dominan memayungi besaran nilai korelasi bivariat silang di antara variabel apa pun dalam model (dimana batas korelasi tertinggi antara SiLPA dan Belanja Modal hanya menembus 0.707). Indikator pembuktian kelayakan instrumen akhirnya disempurnakan oleh perolehan nilai parameter konsistensi reliabilitas internal, yakni *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*, yang bertengger pada nilai 1.000, yang membuktikan bahwa data rekam jejak neraca akuntansi audit BPK ini kebal terhadap infeksi (*random measurement error*).

Beralih pada kapabilitas penjelas jaringan struktural (*inner model prediction*), komputasi memperlihatkan kekuatan yang superior. Parameter elastisitas daya dukung prediksi (*Stone-Geisser Q-squared / Q2*) memproyeksikan nilai silang sebesar 0.897 terhadap konstruksi variabel Belanja Modal (Z) serta 0.491 untuk varians prediksi Kemandirian Keuangan (Y). Kedua matriks perolehan di atas secara telak lolos dari batas krisis >0 , menjamin bahwa arah observasi empiris dapat diaplikasikan untuk fungsi peramalan (*forecasting validity*). Arsitektur keandalan model holistik (*model fit and quality indices*) diuraikan secara rinci pada instrumen Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Matriks Indeks Kesesuaian Model Holistik (*Model Fit Indices*)

Parameter Kualitas Fit Model	Estimasi Koefisien	Signifikansi P-Value	Kriteria Ambang Batas Ideal	Keputusan Status Kesesuaian
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0.340	$P = 0.042$	Signifikan pada $P < 0.05$	Valid & Signifikan
<i>Average R-squared (ARS)</i>	0.690	$P < 0.001$	Signifikan pada $P < 0.05$	Valid, Sangat Signifikan
<i>Average Adjusted R-squared (AARS)</i>	0.565	$P < 0.001$	Signifikan pada $P < 0.05$	Valid, Sangat Signifikan
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	2.878	Tidak Relevan	Wajib ≤ 5.0 (Ideal ≤ 3.3)	Terbebas dari Multikolinearitas
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	3.208		Wajib ≤ 5.0 (Ideal ≤ 3.3)	Terbebas Kolinearitas Penuh
<i>Tenenhaus Goodness of Fit (GoF)</i>	0.831		Klasifikasi <i>Large</i> (≥ 0.36)	Kecocokan Sangat Superior

<i>Simpson's Paradox Ratio</i> (SPR)	1.000		Bebas Anomali (≥ 0.7)	Nihil Paradoks Kausalitas
<i>R-squared Contribution Ratio</i> (RSCR)	1.000		Idealnya Mendekati 1.0	Kontribusi Model Sempurna

Indeks validasi komprehensif pada Tabel 3 menegaskan pencapaian kaliber pembuktian empiris yang nyaris tanpa tanding untuk klasifikasi data keuangan bersampel sempit. Indikator *Tenenhaus GoF* yang menorehkan angka 0.831, yang secara drastis menghancurkan ambang syarat tertinggi 0.36 untuk kategori *Large Fit*, menjadi jaminan hakiki atas ketajaman model WarpPLS dalam menangkap varians patologi ekonomi di Kutai Timur. Rasio *Simpson's Paradox* (SPR) dan *R-squared Contribution Ratio* (RSCR) yang meraih nilai maksimum 1.000 mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari ancaman kausalitas halusinatif; memastikan tidak adanya variabel tersembunyi (*confounding variables*) yang secara diam-diam mampu mendistorsi putaran arah panah hipotesis. Di saat yang bersamaan, skor pengujian VIF (2.878 dan 3.208) menyelamatkan seluruh rangkaian regresi jalur dari jebakan hantu *Multicollinearity*.

Pembuktian Hipotesis Pengaruh Langsung dan Perantara

Tahapan kritikal perumusan kesimpulan saintifik dianalisis dengan membedah magnitudo dari matriks jaringan koefisien jalur dan membandingkannya terhadap postulasi teoretis. Hasil eksekusi *path coefficients* disajikan pada matriks Tabel 4 untuk hipotesis efek utama, serta Tabel 5 untuk relasi efek tidak langsung (mediasi).

Tabel 4. Validasi Signifikansi Relasi Kausal Langsung (*Direct Path Effects*)

Kode Hipotesis	Arah Konstruksi Relasi (Path)	Estimasi Bobot Koefisien (β)	Nilai Probabilitas (P-Value)	Besaran Effect Size	Interpretasi Signifikansi & Keputusan
H1	SiLPA (X1) $\rightarrow$ Belanja Modal (Z)	0.563	0.007 (Sig.)	0.524 (Besar)	Pengaruh Positif Signifikan; Hipotesis 1 Diterima
H2	Dana Transfer (X2) $\rightarrow$ Belanja Modal (Z)	0.426	0.036 (Sig.)	0.389 (Besar)	Pengaruh Positif Signifikan; Hipotesis 2 Diterima
H3	SiLPA (X1) $\rightarrow$ Kemandirian Keuangan (Y)	-0.676	0.001 (Sig.)	0.454 (Besar)	Pengaruh Negatif Signifikan; Hipotesis 3

					Diterima
H4	Dana Transfer (X2) → Kemandirian (Y)	-0.010	0.487 (N.S)	0.005 (Abaikan)	Tidak Signifikan; Hipotesis 4 Ditolak Mutlak
H5	Belanja Modal (Z) → Kemandirian (Y)	-0.024	0.469 (N.S)	0.008 (Abaikan)	Tidak Signifikan; Hipotesis 5 Ditolak Mutlak

Sumber: Data Diolah (2026)

Hipotesis pertama (H1) mengenai determinasi kausal dari SiLPA terhadap fluktuasi Belanja Modal terbukti secara empiris dengan koefisien laju arah (β) bernilai positif dominan 0.563, yang dikawal oleh *P-Value* eskترم sebesar 0.007. Pembuktian absolut dari korelasi kuantitatif ini menghidupkan kembali pembenaran akan berlakunya dalil *Incremental Budgeting Theory* di ruang rapat legislatif lokal; di mana surplus penimbunan likuiditas perbendaharaan di satu tahun kas selalu dijadikan sebagai bantalan psikologis dan fondasi utama bagi para pengambil kebijakan birokrasi untuk menekan akselerator pembentukan proyek konstruksi fisik di koridor tahun anggaran selanjutnya. Mekanisme transmisi kausalitas permodalan ini mendapatkan legalitas birokrasinya melalui pelindung rezim Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara eksplisit memperkenankan otoritas eksekutif Bupati beserta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membongkar total kerangka APBD Murni melalui ritual perumusan APBD Perubahan (APBD-P), dengan menggunakan seluruh injeksi saldo anggaran lebih tahun lalu sebagai nyawa pembiayaan defisit belanja (*deficit financing*).¹

Hipotesis kedua (H2) memvalidasi peran hegemonik Dana Transfer pemerintah pusat dalam mendikte porsi Belanja Modal daerah secara positif dan signifikan ($\beta = 0.426$, probabilitas $P = 0.036$). Temuan mencolok ini tidak sekadar menyuguhkan validasi matematis biasa, melainkan menghadirkan pencerahan konklusif mengenai manifestasi dari bekerjanya sindrom perilaku patologis yang dikenal dengan nama *Flypaper Effect* pada postur belanja modal skala kabupaten. Postulat lawas dari penganut ekonomi neoklasik mengenai perumpamaan "uang bantuan pusat akan selalu merekat kuat di sektor institusi di mana ia dihempaskan" (Hines & Thaler, 1995) terbukti tetap sakti dan relevan mendistorsi kemurnian sistem desentralisasi saat ini. Di saat brankas rekening bendahara umum daerah Kabupaten Kutai Timur tengah dibanjiri dan disiram oleh limpahan kucuran transfer DBH ekstraktif batubara dan CPO sawit, daya respons (elastisitas) para oligarki birokrat lokal seketika bermetamorfosis menjadi hiper-ekspansif yang berlebihan. Kepekaan determinasi dari pemerintah daerah untuk melipatgandakan dan menggelembungkan plafon kontrak pengadaan paket-paket proyek fisik (*capital expenditure*) meroket menjadi berkali-kali lipat lebih elastis ketika didorong oleh

asupan uang "pemberian" dari Kementerian Keuangan pusat, dibandingkan dengan reaksi kelesuan mereka apabila pembangunan tersebut harus didanai dari sumber jerih payah pemungutan retribusi atau ekstensifikasi pajak warung dan PBB-P2 dari keringat masyarakatnya sendiri.

Sebuah deviasi struktural yang paling provokatif, sekaligus mengungkap tabir gelap otonomi, berhasil dipecahkan pada tahapan perumusan Hipotesis ketiga (H3). Variabel SiLPA secara mengejutkan terdeteksi kuat menancapkan pengaruh degeneratif yang ekstrem terhadap pencapaian Kemandirian Keuangan Daerah. Fakta memprihatinkan ini ditunjukkan oleh kehadiran kurva polaritas terbalik (koefisien β menyentuh angka -0.676) dengan mengantongi derajat probabilitas $P=0.001$ yang berskala ultra-signifikan.

Di mata awam maupun politisi awam di panggung legislatif, keberadaan saldo kas berlebih triliunan rupiah (SiLPA) di akhir tahun kerap kali dipropagandakan sebagai monumen sebuah prestasi cemerlang kedisiplinan dan "keberhasilan" penghematan (*cost saving*). Namun, pisau bedah ilmu ekonometrika membongkar kepalsuan ilusi ini; ledakan eskalasi SiLPA yang terus-menerus membengkak menjadi genangan kas berlebih di Kabupaten Kutai Timur sejatinya merupakan manifestasi empiris atas bangkrutnya sistem kelembagaan daerah (inefisiensi alokatif paripurna) akibat hilangnya kapasitas instansi birokrasi dalam memutar mesin uang menjadi motor penggerak peradaban infrastruktur. Penumpukan genangan likuiditas masif ini memicu petaka kelumpuhan *opportunity cost* (hilangnya nilai guna tambah ekonomi modal) di mana momentum perputaran sirkulasi uang kartal yang semestinya berfungsi menghidupi kegiatan perekonomian lokal mengalami pembekuan dan tertimbun.

Oleh karena kontraktor tertunda pembayarannya dan tender tak jalan, laju rotasi mesin ekonomi riil para pelaku usaha menengah dan masyarakat bawah menjadi tersendat, mengalami pelambatan, atau stagnasi struktural. Lesunya transaksi perekonomian komersial horizontal otomatis menyebabkan pelemahan serapan omzet yang fatalnya bermuara pada mengerutnya volume kapasitas basis perluasan pajak daerah (*tax base*), menghentikan sumber darah penerimaan primer. Siklus melingkar yang mematikan dan bersifat patologis inilah yang menghancurkan persentase kapasitas mandiri daerah, dan akhirnya berkonjugasi melahirkan sebuah peradaban *Fiscal Laziness*.¹ Di atas singgasana likuiditas SiLPA tersebut, otoritas eksekutif dan aparaturnya pemungut pajak daerah pada akhirnya kehilangan seluruh insting "lapar" dan hasrat berinovasi (*creative disruption*) untuk bergerilya menyisir penerimaan daerah baru, sebab mereka telah dirasuki, dininabobokan, dan dikendalikan oleh perasaan aman psikologis semu atas kehadiran bantalan tebal brankas yang penuh.

Sementara itu, proses investigasi pada keruntuhan tata logika pada Hipotesis keempat (H4) dan Hipotesis kelima (H5) berhasil mendekonstruksi habis asumsi idealistis dalam madzhab pembangunan linier konvensional. Data observasional secara terang menolak postulat positif dan membuktikan bahwa guyuran Dana Transfer sama sekali tidak berimplikasi, tidak memiliki signifikansi statistik apa pun,

dan gagal berkorelasi terhadap fluktuasi Kemandirian Keuangan Daerah ($\beta = -0.010$, probabilitas terbuang $P=0.487$). Begitu pun hal yang serupa menimpa keberadaan porsi instrumen Belanja Modal; komoditas pembangunan investasi birokrasi ini tidak memiliki satu pun keabsahan daya angkat empiris untuk mendongkrak Kemandirian Daerah ($\beta = -0.024$, gagal menembus batas kelayakan di $P=0.469$).

Kelumpuhan validasi pada kedua kutub parameter tersebut membongkar realitas keras yang membenarkan bahwa kawasan Kutai Timur tengah terperangkap tak berkutik di dasar palung jebakan teoretis Kutukan Sumber Daya Alam (*Natural Resource Curse*) sekaligus terpapar akut *Dutch Disease* (Penyakit Ekonomi Belanda) lokal. Hujan dan kemarau dari volume transfer DBH batubara yang berfluktuasi secara amat liar yang semata-mata dikendalikan oleh angin gejala volatilitas penetapan Harga Acuan Batubara (HBA) di bursa energi dunia, sama sekali bukanlah merupakan produk output dari determinasi inovasi ataupun reformasi manajemen tata kelola perpajakan pemerintah lokal itu sendiri.¹ Karena itu, curahan uang tersebut tak pernah mencetak *chemistry* terhadap etos kemandirian.

Yang paling menghancurkan kredibilitas perencanaan daerah adalah, kucuran triliunan rupiah APBD yang dibanggakan dan dikonversi dengan gemerlap menjadi aset bangunan "modal" di atas neraca daerah, pada faktanya secara analitis empiris telah terjebak ke dalam jurang formasi belanja birokrasi yang bersifat konsumtif semu dan sarat akan proyek monumental "kosmetik" infrastruktur fasad gedung-gedung administrasi pemerintah atau pelebaran jalan lingkar tanpa kajian kelayakan pusat niaga, ketimbang secara presisi dan radikal diarahkan untuk menciptakan atau mengakselerasi fasilitas pabrik pembentukan sentra-sentra kawasan produksi manufaktur, pembangunan fasilitas depo peti kemas pelabuhan komersial industri agrikultur, peluncuran jaringan infrastruktur rantai pasok terintegrasi untuk hilirisasi perkebunan kelapa sawit yang dapat menghasilkan turunan CPO (*Crude Palm Oil*), yang sesungguhnya secara mutlak akan memercikkan kobaran efek pengganda ekonomi majemuk dan berantai (*multi-layered multiplier economic effect*) yang akan merangsang timbulnya korporasi dan tenaga kerja baru yang nantinya akan menjadi basis pajak pungutan daerah secara ajek, lestari, dan berkelanjutan melintasi zaman pasca-tambang.

Tabel 5. Validasi Efek Mediasi Struktural Melalui Analisis Jalur Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

Rute Mediasi / Hipotesis Struktural (Garis Putus-Putus Model)	Koefisien Transmisi Tidak Langsung (β)	Standar Error (SE)	Signifikansi (P-Value)	Interpretasi Keputusan Efek Mediasi
H6: Transformasi SiLPA → melalui perantara instrumen	-0.013	0.211	0.475 (N.S)	Gagal Mutlak / Belanja Modal Tidak Mampu

Rute Mediasi / Hipotesis Struktural (Garis Putus- Putus Model)	Koefisien Transmisi Tidak Langsung (β)	Standar Error (SE)	Signifikansi (P- Value)	Interpretasi Keputusan Efek Mediasi
Belanja Modal → memicu Kemandirian				Berfungsi Sebagai Mediator
H7: Injeksi Transfer Pusat → melalui perantara instrumen Belanja Modal → memicu Kemandirian	-0.010	0.211	0.481 (N.S)	Gagal Mutlak / Belanja Modal Tidak Mampu Berfungsi Sebagai Mediator

Sumber: Data Diolah (2026)

Pada konstelasi Tabel 5 secara definitif dan mematikan meruntuhkan sekaligus menggugurkan keberlakuan hipotesis perantara tidak langsung, yakni Hipotesis keenam (H6) maupun Hipotesis ketujuh (H7). Bencana keruntuhan transmisi kausalitas mediasi struktural berantai ini secara metodologis bukanlah sebuah anomali acak, melainkan merupakan konsekuensi rasional, mutlak, dan matematis murni dari telah terputus serta patahnya sambungan mata rantai konseptual model di etape jalur final terminal (yakni kegagalan pengujian pada jalur H5). Mengingat variabel sentral Belanja Modal secara independen telah terbukti secara sah tak terbantahkan mengidap penyakit cacat fungsional birokratis dalam membangun daya pegas pemungutan PAD secara mandiri, maka instrumen mediator ini secara logis otomatis terlucuti kapabilitas perantara transformasinya untuk berevolusi menjadi katalisator perekonomian.

Sehebat apa pun limpahan *fiscal space* dari tabungan tebal SiLPA serta segarang apa pun terjangan gelombang triliunan Dana Transfer dari Kemenkeu yang disuntikkan ke dalam neraca daerah Kutai Timur, semua uang tersebut tidak akan pernah bisa direkayasa untuk terkonversi apalagi bermetamorfosis menjadi derajat Kemandirian Keuangan Daerah, selama instrumen perantara utamanya, yaitu mesin birokrasi perancang Belanja Modal, selalu terus-menerus gagal dimanfaatkan sebagai tuas pengungkit produktivitas sentra-sentra inkubasi niaga dan kawasan padat modal bagi para pedagang dan masyarakat yang bisa memompa darah perputaran urat nadi perekonomian.

Pangkal balanya secara teknis dapat dibongkar: disrupsi ketidaksiapan platform *cloud* teknis aplikasi sentralistik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lalu diikuti oleh penyakit sistemik keterbatasan drastis dari SDM fungsional kapabilitas aparatur pada seksi layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan

Jasa (UKPBJ)), di mana seluruh komplikasi administrasi kelam ini terus saja dikombinasikan dengan sentralisasi kedatangan banjir aliran penerimaan DBH transfer dari Jakarta secara dadakan dan menumpuk di menit-menit berdarah pengujung termin waktu Triwulan IV, yang tak pelak selalu memunculkan kepanikan massal di mana tender pelelangan konstruksi infrastruktur dipastikan akan kerap macet, putus kontrak, mengalami gagal tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan pada ujung penderitaannya dana peruntukan konstruksi yang telah dianggarkan tersebut terpaksa dikembalikan lagi lalu dibekukan perlahan menjadi pundi-pundi angka SiLPA patologis di lembar laporan akhir. Dinamika negosiasi politik anggaran lobi-lobi di tahap ketok palu pembahasan sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan dengan kalangan legislatif lokal di penghujung tahun semakin mempersempit paksa dan memenggal sisa waktu jendela eksekusi penyelesaian konstruksi fisik lapangan, melengkapi perangkaian rantai panjang inefisiensi yang telah membatu, yang pada gilirannya secara fatal dan absolut menggugurkan pupusnya peluang dan asa mulia untuk menuntaskan transisi sejarah dari status daerah terdesentralisasi pasif yang manja, berubah menuju wujud entitas geopolitik wilayah administratif yang secara murni, mandiri, dan sungguh-sungguh merdeka secara fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil analisis pembuktian kausalitas empiris yang dipotret, dipetakan, dan dibedah secara forensik ekonomi melalui instrumen ekonometrika kontemporer algoritma *Variance-Based SEM-PLS (WarpPLS)* dalam kerangka riset strategis ini mengantarkan pada penarikan sintesis konklusi yang teramat tajam dan mendasar mengenai postur disfungsi anatomi makro-fiskal yang menjangkiti tata pemerintahan otonom di sebuah daerah lumbung devisa energi.

Kesimpulan Pertama, secara empiris dan komprehensif, akumulasi timbunan dana sisa kas (SiLPA) serta masuknya gelombang kejut dari miliaran volume Dana Transfer terbukti secara nyata memantik rangsangan daya respons hiper-ekspansif yang sangat elastis dan positif terhadap eskalasi inflasi alokasi pada pos Belanja Modal fisik.¹ Korelasi linier yang tak terbantahkan ini, secara esensial, merupakan bukti akademis otentik yang sekaligus mendiagnosis dengan presisi stadium akut dari berjangkitnya pandemi fenomena *Flypaper Effect* pada konfigurasi saraf psikologis mentalitas perancangan pengelolaan anggaran di tubuh birokrasi daerah, di mana belanja meroket jauh lebih brutal saat ditenagai subsidi eksternal dibanding uang pungutan mandiri.

Kesimpulan Kedua, pada tapal batas tahap uji evaluasi dampak efek akhir dari seluruh agregasi sistem tata kelola aliran kebijakan *budgeting* publik, triliunan rupiah uang hibah sumber daya alam dan tabungan ini terbukti secara menyesakkan gagal memperanakkan kemandirian. Secara sangat luar biasa signifikan, keberadaan postur angka SiLPA yang membesar berlebih memancarkan pengaruh efek yang sangat degeneratif, destruktif, dan meracuni pencapaian pada parameter indeks Kemandirian Keuangan Daerah.¹ Keberadaan arah kausalitas yang berbanding

terbalik secara radikal ini dengan tegas mempertegas keberadaan sebuah diagnosis sindrom mematikan yang disebut sebagai *Fiscal Laziness* (kemalasan mental fiskal birokrasi institusional) di mana aktivitas menimbun dan membekukan sisa aset likuid berupa dana yang parkir di akun perbankan pemerintah pada akhirnya secara berantai merusak perputaran *cash flow* pasar yang mengakibatkan mesin roda sirkulasi komersial ekonomi meradang, berkarat, macet parsial, dan membuat kurva potensi basis perpajakan pengusaha lokal serta pedagang akar rumput mengalami kontraksi terhempas dalam resesi lokal, hingga pada tahap akhir melunturkan gairah inovasi Bapenda untuk memeras otak memperluas basis retribusi daerah.

Kesimpulan Ketiga dan Terakhir, terputus sertamerta lumpuhnya seluruh simpul tulang punggung dari rute transmisi mediasi pengujian struktural intervening (gagalnya H6 dan H7 akibat tertolaknya hipotesis relasi antara infrastruktur modal terhadap rasio mandiri di hipotesis kelima) mengonfirmasi telak kepada kita sebuah kelemahan filosofis dan kecacatan strategis esensial: besarnya volume uang APBD yang telah terserap, dibakar habis, dan dilebur dikonversi membeku menjadi bentuk bangunan wujud *hardware* proyek sipil infrastruktur fisik ternyata gagal total dalam fungsinya sebagai katalisator menstimulasi daya bangkit *multiplier effect* dorongan putaran kecepatan ekonomi transaksi masyarakat lokal, diakibatkan oleh tendensi fatal dari monopoli pendirian fasilitas infrastruktur konsumtif yang steril dari jiwa pencetakan modal komersial (*commercial rates of return*) sehingga sama sekali tidak berefek bagi lompatan penerimaan kapasitas pemajakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara jangka panjang.

Saran yang direkomendasikan dan disodorkan dari studi akademik empiris ini mewajibkan diimplementasikannya langkah-langkah dekonstruksi ekstrem kelembagaan. Sebagai wujud tindak lanjut respons manajerial operasi dan resolusi penyelamatan atas komplikasi disfungsi mesin sistemik tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta kubu eksekutif Kepala Daerah dipaksa dan diwajibkan untuk segera mungkin membongkar total serta mendekonstruksi ulang pilar penyangga desain penjadwalan *timeline* perencanaan kalender lelang pelelangan, dengan menerapkan strategi implementasi percepatan pengadaan atau sistem mekanisme eksekusi lelang jauh di awal tahun secara paralel tanpa menunggu RKA turun secara penuh (*early physical procurement / pra-tender*) demi mencerabut sampai ke akar dan mengeliminasi penyakit penumpukan penandatanganan SPK pencairan tagihan uang di menit-menit akhir pengujung termin triwulan bulan Desember yang sejauh ini selalu menjadi generator utama biang keladi lahirnya monster SiLPA artifisial patologis.

Saran kedua berpusat di lingkaran administrasi tata pemerintahan lintas yurisdiksi, di mana urgen untuk dibangunnya rekayasa penyusunan harmonisasi sinkronisasi ketat yang mengikat perihal siklus arus transfer kas tunai antara entitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi/kabupaten bersama dengan kantor Direktorat Jenderal Kemenkeu selaku empunya kas bendahara umum negara pusat, agar irama *transfer* menyelaraskan napas dengan dinamika lapangan. Pada sisi makro arsitektur ketatanegaraan otonomi, mutlak diperlukan inisiasi

perombakan transformasi secara filosofis radikal dari implementasi pakem fungsional pengawasan lembaga kontrol legislatif (DPRD lokal) dalam tahapan pengesahan kerangka draf Kebijakan Umum Anggaran.¹ Arah kompas haluan doktrinasi eksekusi pengajuan alokasi Belanja Modal wajib bergeser dari ego pembangunan proyek gedung pemerintahan mentereng menuju fokus pada penciptaan sentra hilirisasi komoditas produktif yang berjiwa niaga padat karya, seperti penciptaan pabrik industri manufaktur pakan konsentrat peternakan sawit serta agroindustri komprehensif, yang menjanjikan sirkulasi mesin pertumbuhan organik sebagai wadah raksasa penarikan bea pajak dan sumur sumbangan ke kas APBD daerah secara permanen.

Di ujung garis spektrum intelektual saintifik ruang akademik, penelitian ini merekomendasikan sekaligus mendesak bagi korps ilmuwan ahli makro-ekonomi publik masa depan, agar berkenan mengonstruksi rumusan indeks persamaan hitung redefinisi baru sebagai acuan alat kalibrasi rasio baku ukur pengukuran performa tingkat derajat otonomi finansial fiskal daerah, agar rumus *benchmark* kinerja tersebut diisolasi dari besaran sumbangan parameter instrumen *windfall* komoditas, dengan memasukkan filter indeks yang dikalibrasi secara eksklusif bagi karakteristik unik dari formasi keuangan daerah kaya galian tanah ekstraktif, sehingga persentase pengumuman pemeringkatan rapot otonomi tak lagi pernah dinodai oleh kebohongan statistik ilusi pergerakan bias fluktuasi nilai eforia kurs barel harga bursa internasional, sehingga sanggup membentengi nalar *good public governance* daerah dari cekikan tak kasat mata jerat kematian *Natural Resource Curse*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Afrizal, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Examining Flypaper Effect in Indonesia: Evidence After Transferring Urban-Rural Land and Building Tax to Locals Government." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 14, no. 2 (2022).
- Aulia, Aulia, and Tambun Tambun. "Synchronization of Central and Regional Govt Policies in Supporting Public Service Performance." *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2025.
- Burhan, Burhan, and others. "Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *Al-Buhuts*, 2022.
- Dewata, Evada, and others. "The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on Local Government Financial Performance." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2021.
- Fadilah, Fadilah, and Helmayunita Helmayunita. "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2020.
- Fitrianti, Fitrianti, and others. "Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From The Central Government to Provincial Regions in Indonesia." *Investment*

Management and Financial Innovations, 2025.

Handayani, Sri, and Erinos Erinos. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2020.

Latipah, Latipah, and others. "Analysis of Factors Affecting Regional Financial Independence in Primary Leading Sectors Using the System Generalized Method of Moments Approach." *Journal of Entrepreneurial Economic*, 2025.

Lewis, Blane D. "Local Government Capital Spending in Indonesia: Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers." *Public Finance and Management*, 2013.

Pratama, Pratama, and others. "Pengelolaan Dana Transfer Dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Terhadap Alokasi Belanja Modal." *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2023.

Prayogo, Prayogo, and others. "ESG Disclosure, Intellectual Capital, Firm Value: Evidence from Indonesia Stock Exchange." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2025.

Putri, Dwi, and Vince Ratnawati. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Syariah)*, 2023.

Sanjaya, Sanjaya, and Helmy Helmy. "Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, Dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2021.

Santoso, Santoso, and Rahayu Rahayu. "Kepercayaan Sebagai Jembatan: Menggali Hubungan Antara Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Dalam Niat Menggunakan." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2024.

Sari, Rini. "Determinants of Local Government Financial Performance." *International Journal of Business Economics*, 2022.

Septianingrum, Septianingrum, and others. "Local Expenditure Financing Response in Regencies and Municipalities in Indonesia: Analysis of the Flypaper Effect Phenomenon." *Journal of Accounting and Investment*, 2025.

Silalahi, Silalahi, and others. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2025.

Solikin, Akhmad. "Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2016.

Utami, Utami, and Pratolo Pratolo. "The Effect of Medical Managers' Accountability to Managerial Performance: The Role of Commitment as Mediating Variable." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2024.

Zamzami, Faiz, and Arief Rakhman. "Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2023.